

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL POLITIK: STUDI LITERATUR PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, DESENTRALISASI, DAN TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK

Alan Manujaya, Anggara Setya Saputra, Aida Nurul Barokah, Alfayzun Dwiky Ramadhan, Raihan Chandra Septian, Rizal Dwi Bachtiyar

¹⁻⁶ Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Publik

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available Januari 2026

jayaan401@gmail.com,
anggara@unwiku.ac.id,
aidanurul777@gmail.com,
faizdr8@gmail.com,
akuntugas191@gmail.com,
rizallbchtyr87@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Government policy implementation constitutes a critical phase in governance administration that determines the successful achievement of national development objectives. This article examines three strategic government policies of Indonesia during the 2020-2025 period that bear significant implications within the realm of socio-political sciences, specifically the Free Nutritious Meals Program (MBG), decentralization and regional autonomy implementation, and digital transformation of public services. The MBG Program, initiated in January 2025, aims to serve 82.9 million beneficiaries with a budgetary allocation of Rp171 trillion, representing human resource investment initiatives and economic redistribution efforts. By August 2025, the program had reached 20 million beneficiaries and generated 290,000 new employment opportunities. Nevertheless, program implementation encounters substantial challenges, with over 10,000 documented food poisoning incidents precipitating a crisis of public confidence. From a public policy theoretical perspective, this program is analyzed through the lens of social investment theory, which underscores the significance of long-term investment in human capital development. This article reveals that social policy implementation in Indonesia entails processes of organizational learning, adaptive management, and state-society negotiation within the framework of global economic dynamics, post-COVID-19 pandemic conditions, and intensifying demands for democratization and transparency.

Keywords: Public policy, Free Nutritious Meals Program, policy implementation

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pemerintah merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Artikel ini menganalisis tiga kebijakan strategis pemerintah Indonesia periode 2020-2025 yang memiliki implikasi signifikan dalam ruang lingkup ilmu sosial politik, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, serta transformasi digital pelayanan publik. Program MBG yang diluncurkan pada Januari 2025 menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp171 triliun, merepresentasikan upaya investasi sumber daya manusia dan redistribusi ekonomi. Hingga Agustus 2025, program ini telah menjangkau 20 juta penerima manfaat dan menciptakan 290.000 lapangan kerja baru. Namun, implementasi program menghadapi tantangan serius dengan tercatatnya lebih dari 10.000 kasus keracunan makanan yang memicu krisis kepercayaan publik. Dari perspektif teori kebijakan publik, program ini dianalisis menggunakan perspektif teori investasi sosial yang menekankan pentingnya investasi jangka panjang pada pengembangan modal manusia. Artikel

ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial di Indonesia melibatkan proses pembelajaran, adaptasi, dan negosiasi antara negara dan masyarakat dalam konteks dinamika ekonomi global, pasca-pandemi COVID-19, serta tuntutan demokratisasi dan transparansi yang semakin menguat.

Kata Kunci : *Kebijakan publik, Program Makan Bergizi Gratis, implementasi kebijakan*

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pemerintah merupakan fase penentu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan karena berpengaruh langsung terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam kajian ilmu sosial politik, kebijakan publik tidak diposisikan semata sebagai perangkat administratif, melainkan sebagai produk proses politik yang melibatkan distribusi kekuasaan, kemampuan kelembagaan negara, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan menjadi indikator penting untuk menilai kualitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan dalam kerangka demokrasi dan pembangunan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai persoalan struktural dalam pelaksanaan kebijakan publik, seperti ketimpangan kapasitas birokrasi dan fiskal antar-daerah, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kompleksitas tantangan tersebut semakin terasa pada periode 2020-2025, seiring dengan dampak pandemi COVID-19, ketidakpastian ekonomi global, serta kebutuhan percepatan pembangunan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi.

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia menggulirkan sejumlah kebijakan strategis yang mencerminkan upaya transformasi sosial politik dan pembaruan tata kelola pemerintahan. Artikel ini menitikberatkan analisis pada tiga kebijakan utama, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta transformasi digital dalam pelayanan publik. Program MBG merupakan kebijakan sosial berskala nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan terkait aspek pengawasan, mutu layanan, dan tingkat kepercayaan masyarakat. Sementara itu, desentralisasi dan otonomi daerah berperan sebagai kerangka struktural yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, sedangkan digitalisasi pelayanan publik ditujukan untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan perluasan akses layanan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dari perspektif ilmu sosial politik melalui pendekatan studi literatur. Analisis difokuskan pada tantangan, pola pelaksanaan, serta implikasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis, desentralisasi dan otonomi daerah, serta transformasi digital pelayanan publik. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami kompleksitas implementasi kebijakan publik di Indonesia sekaligus menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks administrasi publik kontemporer, implementasi kebijakan tidak lagi dipandang sebagai proses linear yang sederhana, melainkan sebagai proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan dinamika sosial politik (Howlett & Mukherjee, 2021). Teori implementasi kebijakan telah

berkembang dari pendekatan top-down yang menekankan kontrol hierarkis menuju pendekatan bottom-up yang lebih memperhatikan peran aktor lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi.

Studi terkini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, komitmen politik, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antar- lembaga. Di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks karena adanya kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah, fragmentasi birokrasi, serta tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi. Oleh karena itu, pendekatan implementasi kebijakan yang adaptif dan kontekstual menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat berjalan efektif di tengah kompleksitas sosial politik Indonesia.

Kebijakan Sosial dan Investasi Modal Manusia

Kebijakan sosial berbasis investasi modal manusia telah menjadi paradigma dominan dalam strategi pembangunan nasional di berbagai negara. Pendekatan ini menekankan pentingnya investasi jangka panjang pada pendidikan, kesehatan, dan nutrisi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan sosial (Heckman & Mosso, 2020). Program-program intervensi gizi, terutama yang menargetkan kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil, terbukti memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas hidup generasi mendatang.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan sosial yang berfokus pada pemenuhan gizi menghadapi tantangan struktural yang kompleks, termasuk tingginya angka stunting, kesenjangan akses terhadap pangan bergizi, serta lemahnya sistem pengawasan kualitas makanan. Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk intervensi negara dalam pemenuhan hak dasar warga negara mencerminkan upaya redistributif yang tidak hanya berdimensi kesehatan, tetapi juga ekonomi politik. Program semacam ini memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok makanan bergizi.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan

Desentralisasi merupakan salah satu reformasi tata kelola pemerintahan terpenting di Indonesia pasca-Orde Baru. Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 telah mengubah secara fundamental relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah (Aspinall & Berenschot, 2019). Desentralisasi tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga mencerminkan demokratisasi dan redistribusi kekuasaan politik yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, implementasi desentralisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan kapasitas fiskal antar-daerah, lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal, serta potensi korupsi di tingkat lokal. Studi terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan daerah, partisipasi masyarakat sipil, serta mekanisme akuntabilitas yang efektif. Dalam konteks pelayanan publik, desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun juga menuntut peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah.

Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik

Transformasi digital telah menjadi agenda global dalam reformasi pelayanan publik, termasuk di Indonesia. Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah (Janowski, 2021). Implementasi e-government dan berbagai platform digital dalam

pelayanan publik mencerminkan upaya modernisasi birokrasi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat digital kontemporer.

Di Indonesia, transformasi digital pelayanan publik telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui berbagai inovasi seperti sistem administrasi kependudukan online, layanan perizinan digital, hingga platform pengaduan masyarakat. Namun, kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta rendahnya literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan dalam pemerataan akses terhadap layanan digital. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi pelayanan publik perlu disertai dengan upaya inklusif yang memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam era digital.

Integrasi Kebijakan dalam Perspektif Ilmu Sosial Politik

Analisis kebijakan publik dalam perspektif ilmu sosial politik memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi kekuasaan, ideologi, dan relasi sosial yang melatarbelakangi proses perumusan dan implementasi kebijakan (Fischer & Miller, 2022). Kebijakan tidak lahir dalam ruang vakum, melainkan merupakan produk dari kontestasi politik, negosiasi antar-aktor, dan refleksi dari struktur sosial ekonomi yang ada. Dalam konteks Indonesia kontemporer, kebijakan-kebijakan strategis seperti program sosial, desentralisasi, dan digitalisasi pelayanan publik mencerminkan upaya negara untuk merespons tuntutan demokratisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat.

Integrasi ketiga domain kebijakan program makan bergizi gratis, desentralisasi, dan digitalisasi menunjukkan kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia. Program sosial membutuhkan mekanisme distribusi yang efektif melalui struktur desentralisasi, sementara digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam implementasi kebijakan. Namun, keberhasilan integrasi ini memerlukan sinergi antar-sektor, koordinasi multi-level pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, meliputi dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi kementerian/lembaga, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi lembaga riset dan media massa kredibel yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Literatur yang digunakan difokuskan pada tiga isu utama, yaitu Program Makan Bergizi Gratis, desentralisasi dan otonomi daerah, serta transformasi digital pelayanan publik.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi berdasarkan tema dan kerangka teori kebijakan publik serta ilmu sosial politik. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan pemerintah dan implikasinya dalam konteks sosial politik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Makan Bergizi Gratis: Investasi SDM dan Redistribusi Ekonomi

Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan (Saptati D.I., 2025). Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui (Sugiarto, 2024). Dengan alokasi anggaran mencapai Rp171 triliun,

program ini bukan sekadar intervensi kesehatan, melainkan instrumen politik redistribusi ekonomi yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal hingga tingkat desa (BPMI Setpres, 2025).

Implementasi program MBG menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) yang disalurkan melalui 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi (Badan Gizi Nasional, 2025). Hingga pertengahan Agustus 2025, program ini telah menjangkau 20 juta penerima manfaat dan menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di sektor dapur umum serta melibatkan sekitar 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM (Humas Kemensetneg, 2025). Dari perspektif ilmu sosial politik, program ini merepresentasikan upaya negara hadir secara langsung dalam kehidupan masyarakat lapisan bawah, sekaligus menjadi instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif.

Namun, implementasi program MBG tidak lepas dari berbagai tantangan dan kontroversi. Sejak Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 10.000 kasus keracunan makanan yang diduga terkait dengan program ini, dengan kasus serentak terbanyak terjadi pada 1.333 pelajar di Bandung Barat (Wikipedia, 2025). Kasus-kasus tersebut memicu krisis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola program berskala besar. Merespons hal ini, Badan Gizi Nasional mengerahkan 5.000 koki profesional dari Indonesian Chef Association untuk melatih dan mendampingi juru masak program MBG agar pengolahan makanan lebih higienis dan sesuai standar gizi. Dinamika ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial selalu melibatkan proses pembelajaran, adaptasi, dan negosiasi antara negara dan masyarakat.

Dari sudut pandang teori kebijakan publik, program MBG dapat dianalisis menggunakan perspektif teori investasi sosial (social investment) yang menekankan pentingnya investasi jangka panjang pada pengembangan modal manusia sebagai kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Kementerian Koordinator Bidang PMK, 2024). Program ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, dengan target menurunkan angka stunting menjadi 14% pada 2024 (Sugiarto, 2024). Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 3,8% anak balita di Indonesia mengalami gizi buruk, 32% anak mengalami anemia, 41% tidak sarapan, dan 58% memiliki pola makan tidak sehat (Kemenko Polkam RI, 2025). Angka-angka ini mengindikasikan urgensi intervensi negara dalam memastikan pemenuhan nutrisi sebagai hak dasar warga negara.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Dinamika Hubungan Pusat-Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia merupakan produk reformasi politik pasca-1998 yang bertujuan untuk mendemokratisasi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat lokal (William, 2022). Berdasarkan artikel dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area (2024), implementasi desentralisasi diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kebijakan ini mencerminkan pengakuan terhadap keragaman geografis, kultural, dan sosial ekonomi Indonesia yang memerlukan pendekatan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam konteks sosial politik, desentralisasi bukan sekadar pemindahan kewenangan administratif dari pusat ke daerah, melainkan transformasi struktural dalam pola hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat (Ismail, 2020). Desentralisasi memberikan ruang bagi partisipasi politik lokal yang lebih intens, melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan pengawasan langsung oleh DPRD dan masyarakat sipil. Hal ini berpotensi memperkuat demokrasi substantif di tingkat akar rumput, di mana warga memiliki

akses lebih besar dalam mempengaruhi kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka.

Namun, evaluasi terhadap implementasi desentralisasi menunjukkan hasil yang beragam dengan berbagai tantangan yang masih harus diatasi. Salah satu kritik utama adalah lemahnya kemandirian fiskal daerah, di mana sekitar 65 persen pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata hanya sekitar 30 persen (Oktaviano, 2025). Kondisi ini menciptakan ketergantungan struktural yang membatasi kemampuan daerah untuk melakukan inovasi kebijakan dan mengelola pembangunan sesuai dengan prioritas lokal. Ketimpangan fiskal ini juga mencerminkan ketimpangan ekonomi regional yang masih signifikan antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Tantangan lain yang muncul dalam implementasi desentralisasi adalah meningkatnya praktik korupsi di tingkat lokal, yang ironisnya justru dipermudah oleh desentralisasi kewenangan tanpa diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas (Simanjuntak, 2015). Fenomena ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang lebih baik jika tidak disertai dengan reformasi kelembagaan yang komprehensif, termasuk penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Diskusi mengenai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga menjadi isu sentral dalam evaluasi desentralisasi di Indonesia. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan kepala daerah dipilih secara demokratis, namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada justru memunculkan berbagai persoalan seperti tingginya biaya politik, polarisasi sosial di masyarakat, serta belum optimalnya hubungan hierarkis antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat (Oktaviano, 2025). Perdebatan tentang apakah Pilkada harus dilaksanakan secara langsung atau melalui mekanisme perwakilan terus bergulir, mencerminkan dinamika antara prinsip demokrasi partisipatoris dan efektivitas pemerintahan.

Transformasi Digital Pelayanan Publik: Menuju Birokrasi Responsif

Berdasarkan Kementerian PANRB (2024), transformasi digital pelayanan publik merupakan kebijakan strategis yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 yang menetapkan percepatan transformasi digital pemerintahan melalui platform INA Digital (Kementerian PAN RB, 2024). Dalam konteks sosial politik, digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar modernisasi teknis, melainkan upaya reformasi birokrasi yang bertujuan mengubah paradigma pelayanan dari yang berorientasi pada kenyamanan birokrasi menjadi berorientasi pada kepuasan dan kemudahan masyarakat.

Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan untuk memastikan transformasi digital pemerintah yang selaras dengan program prioritas pembangunan (Kementrian PANRB, 2025). Transformasi ini meliputi integrasi berbagai layanan publik dalam satu platform, seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, dan portal pelayanan publik (Humas MENPANRB, 2023). Berdasarkan data dari Kementrian PANRB (2024), hingga saat ini, telah terdata 27.000 aplikasi pelayanan publik yang sedang dalam proses integrasi untuk menghindari fragmentasi dan duplikasi layanan.

Salah satu inovasi penting dalam transformasi digital adalah pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) yang telah di-rebranding menjadi "Cari Yanlik," sebuah portal di mana masyarakat dapat mencari informasi pelayanan yang disediakan dan

diperbaharui langsung oleh penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) yang mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di MPP konvensional dalam satu aplikasi agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara terpadu. Tercatat hingga 2025 terdapat sebanyak 216 MPP yang telah diresmikan dan beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Dari perspektif ilmu sosial politik, digitalisasi pelayanan publik dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi negara melalui peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi (Isma et al., 2025). Dalam teori governance, responsivitas dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang menentukan kualitas hubungan antara negara dan warga negara. Dari artikel komdigi.co.id, digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara real-time, mengajukan keluhan melalui platform digital seperti SP4N-LAPOR!, dan memantau kinerja pemerintah secara lebih efektif. Hal ini berpotensi mengubah dinamika kekuasaan tradisional di mana informasi dan akses terhadap layanan publik dikontrol secara hierarkis oleh birokrasi.

Namun, implementasi digitalisasi pelayanan publik menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kesenjangan digital (digital divide) antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang memiliki akses dan literasi digital dengan yang tidak (Ainiyah, 2024). Data menunjukkan bahwa masih banyak daerah di Indonesia, terutama di kawasan timur, yang belum memiliki infrastruktur internet yang memadai, sehingga akses terhadap layanan digital pemerintah menjadi terbatas. Selain itu, isu keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian serius, terutama dalam sistem yang melibatkan data pribadi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak menciptakan eksklusi baru bagi kelompok rentan yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi digital.

Konvergensi Kebijakan dan Sinergi Implementasi

Ketiga kebijakan yang telah dibahas—Program Makan Bergizi Gratis, desentralisasi dan otonomi daerah, serta transformasi digital pelayanan publik—menunjukkan upaya komprehensif pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi sosial politik yang holistik. Program MBG merepresentasikan kebijakan redistributif yang bertujuan mengurangi ketimpangan akses terhadap nutrisi dan kesehatan; desentralisasi mencerminkan upaya demokratisasi dan pemberian ruang bagi partisipasi politik lokal; sementara digitalisasi pelayanan publik merupakan modernisasi birokrasi yang berorientasi pada efisiensi dan transparansi. Ketiganya saling berkaitan dan memerlukan sinergi dalam implementasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks implementasi Program MBG, desentralisasi memainkan peran penting dalam memastikan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi penerima manfaat, mengelola SPPG, dan mengawasi pelaksanaan program di lapangan. Sementara itu, digitalisasi mendukung transparansi dan akuntabilitas program melalui sistem monitoring berbasis digital yang memungkinkan pemerintah pusat dan masyarakat untuk memantau penyaluran bantuan secara real-time dan memastikan tepat sasaran (Kementrian PANRB, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian studi literatur, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah di Indonesia merupakan proses yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh beragam faktor sosial, politik, serta kelembagaan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak semata-mata bergantung pada ketepatan perumusan kebijakan, melainkan juga pada kekuatan kapasitas institusional negara, efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,

serta pola interaksi yang terbangun antara negara dan masyarakat. Dalam konteks demokrasi dan pembangunan, implementasi kebijakan berfungsi sebagai tolok ukur penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus legitimasi kebijakan publik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan kebijakan sosial yang berorientasi pada investasi modal manusia dan memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong redistribusi ekonomi melalui penguatan ekonomi lokal. Namun, pelaksanaan program ini masih dihadapkan pada tantangan substansial, khususnya dalam aspek pengawasan mutu makanan, kesiapan aparatur pelaksana di tingkat daerah, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik akibat munculnya kasus keracunan makanan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kebijakan sosial berskala nasional membutuhkan sistem pengendalian yang kuat, standar operasional yang terstruktur, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara efektif.

Dalam konteks desentralisasi dan transformasi digital pelayanan publik, artikel ini menekankan pentingnya sinergi kebijakan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Desentralisasi memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketimpangan kapasitas fiskal, lemahnya koordinasi antarpemerintah, serta potensi penyimpangan di tingkat lokal. Sementara itu, digitalisasi pelayanan publik menawarkan peningkatan efisiensi dan transparansi, tetapi masih dibatasi oleh kesenjangan akses digital dan rendahnya literasi teknologi di sebagian masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan publik di Indonesia memerlukan pendekatan yang adaptif, inklusif, dan akuntabel agar reformasi kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I. N. (2024). *Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital: Teknologi sebagai Katalisator Efisiensi dan Kualitas*. ap.umsida.ac.id.
- Akselerasi SPBE: Pembentukan INA Digital dan upaya cepat integrasi layanan publik digital. (2024). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-spbe-pembentukan-ina-%0Adigital-dan-upaya-cepat-integrasi-layanan-publik-digital%0A>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Layanan unggulan untuk masa depan sehat Indonesia*. Badan Gizi Nasional. <https://www.bgn.go.id/>
- BPMI Setpres. (2025). *Presiden Prabowo: Program makan bergizi gratis adalah investasi untuk masa depan bangsa*. Presidenri.go.id. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-program-makan-bergizi-gratis-adalah-investasi-untuk-masa-depan-bangsa/>
- Fischer, F., & Miller, G. J. (2022). *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods*. New York: Routledge.
- Heckman, J. J., & Mosso, S. (2020). The economics of human development and social mobility. *Annual Review of Economics*, 12, 543-572. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-economics-072819-102824>
- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2021). *Routledge handbook of policy design*. New York: Routledge.
- Humas Kemensetneg. (2025). *Program makan bergizi gratis sentuh 20 juta penerima, ciptakan 290 ribu lapangan kerja*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/program_makan_bergizi_gratis_sentuh_20_juta_p

- enerima_ciptakan_290_ribu_lapangan_kerja
- Humas MENPANRB. (2023). *Presiden keluarkan Perpres percepatan GovTech dan interoperabilitas layanan digital nasional*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/presiden-keluarkan-perpres-percepatan-govtech-dan-interoperabilitas-layanan-digital-nasional>
- Isma, Y. S., Kardiati, D., Muslem, M., Fadhillah, S. K., KN, J., Akmal, F., & Chairunnisak, S. (2025). Transformasi digital sebagai instrumen untuk memperluas aksesibilitas layanan publik. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(2), 66-77.
- Ismail, G. (2020). Implementasi otonomi daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 190-205.
- Janowski, T. (2021). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101592. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101592>
- Kebijakan desentralisasi dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah di Indonesia*. (2024). Pemerintahan.Uma.Ac.Id. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/kebijakan-desentralisasi-dan-dampaknya-terhadap-pemerintahan-daerah-di-indonesia/>
- Kemenko Polkam RI. (2025). *Menko Polkam: Program Makan Bergizi Gratis Terus Diperluas, Ketahanan Gizi Fondasi Ketahanan Nasional*. Kemenko Polkam RI. <https://polkam.go.id/menko-polkam-program-makan-bergizi-gratis-terus-diperluas-ketahanan-gizi-fondasi-ketahanan-nasional/>
- Kementerian PANRB sosialisasikan transformasi digital, pelayanan publik harus semakin cepat. (2024). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-sosialisasikan-transformasi-digital-pelayanan-publik-harus-semakin-cepat>
- Makan bergizi gratis*. (2025). Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Makan_Bergizi_Gratis
- Oktaviano, T. (2025). *Desentralisasi Belum Efektif: Badan Pengkajian MPR RI Bahas Kesenjangan Otonomi Daerah*. Aktual.com. <https://aktual.com/desentralisasi-belum-efektif-badan-pengkajian-mpr-ri-bahas-kesenjangan-otonomi-daerah/>
- Pemerintah kebut digitalisasi layanan publik*. (2024). Komdigi.go.id.
- Pemerintah optimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui transformasi layanan digital prioritas*. (2025). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-optimalkan-pelayanan-kepada-masyarakat-melalui-transformasi-layanan-digital-prioritas>
- Program makan bergizi gratis untuk tingkatkan kualitas SDM Indonesia*. (2024). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. <https://www.kemenkopmk.go.id/program-makan-bergizi-gratis-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm-indonesia>
- Saptati D.I., R. (2025). *Pemerintah salurkan makan bergizi gratis (MBG), ini sasaran utama penerimanya*. Media Keuangan Kementerian Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimanya>
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130.
- Sugiarto, E. C. (2024). *Makan bergizi gratis dan SDM unggul*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/makan_bergizi_gratis_dan_sdm_unggul
- William, A. (2022). *Desentralisasi dan otonomi daerah: Pengertian serta tujuannya*. Tirto.id. <https://tirto.id/desentralisasi-dan-otonomi-daerah-pengertian-serta-tujuannya-ga4F>